



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

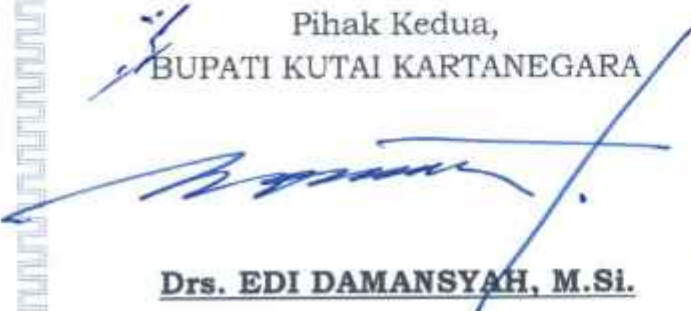
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

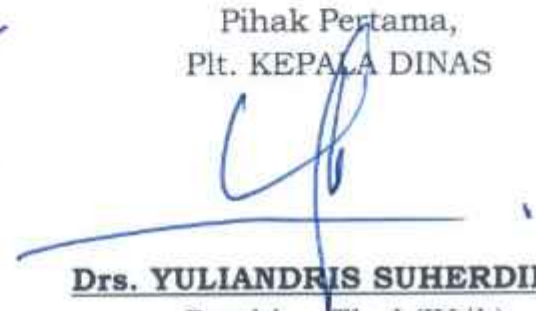
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
17.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
18.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

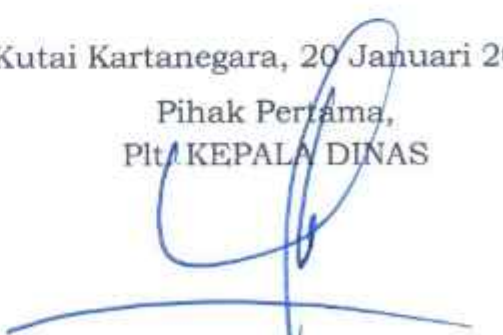
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.17.802.030.279	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.6.170.000.000	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp.50.000.000	APBD
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.5.508.500.000	APBD
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.7.033.800.000	APBD
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.2.475.000.000	APBD
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp.1.900.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.40.939.330.279	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SERAPUL ANAM,SE,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5. Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
6. Terlaksananya peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
7. Melaksanakan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8. Pelaksanaan Input data Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
9. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah
10. Penunjang data dukung Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Menyiapkan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12. Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
12. Menyiapkan,Memproses data menjadi informasi serta mengoordinasikan,peleksanaan urusan umum ketatalaksanaan,Kepegawaian perencanaan penganggaran, keuangan dan aset
13. Tersusunnya kebijakan administrasi Urusan Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
14. Terlaksananya tugas dan Fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
PEMBINA. TK. I
NIP.19680708 1994903 1 013

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**


SERAPUL ANAM, SE.MM.
PEMBINA
NIP. 19681011 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dokumen	1
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Laporan	4
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	4
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	Dokumen	4
5	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen	2
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Paket	5
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Paket	20
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Paket	3
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	Paket	4
11	Penyediaan Bahan/Material	Paket	Paket	10
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	200
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen	500
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Dokumen	3
15	Pengadaan Mobil	Unit	Unit	215

14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Unit	200
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	3
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Laporan	12
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Laporan	12
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Unit	7
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Unit	29
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Unit	78
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	Unit	5
22	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
PEMBINA. TK. I
NIP.19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**


SERAPUL ANAM, SE.MM.
PEMBINA
NIP. 19681011 199403 1 007

		Perangkat Daerah		
23	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
24	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	APBD
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	30.000.000	APBD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	APBD
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	APBD
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	5.110.200	APBD
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.247.000	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	APBD
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.000.000	APBD
10	Penyediaan Bahan/Material	29.998.000	APBD
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	APBD
12	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	30.000.000	APBD
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	APBD
14	Pengadaan Mabel	540.832.000	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.003.836	APBD
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.299.000	APBD
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	316.485.288	APBD
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.393.288	APBD
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	APBD
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	APBD
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	3.000.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		6.031.536.612	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF JIWANDONO**

Jabatan : **PENGELOLA DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM,SE.MM**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penganggaran BMD; ✓
2. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BMD) agar memudahkan dalam melaksanakan Pengelolaan Pemafaatan Barang Milik Daerah (BMD); ✓
3. Mendokumentasikan dan Membuat label kode/lokasi barang milik daerah (BMD) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib dalam administrasi;
4. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD); ✓
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan ✓
7. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025 ; ✓

8. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di perangkat daerah ; ✓
9. Menyiapkan Usulan permohonan penetapan status Barang Milik Daerah (BMD);
10. Membuat dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah (BMD); ✓
11. Menyusun dan membuat laporan Barang triwulan, semester dan tahunan Barang Inventaris;
12. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan Pakai Habis;
13. Melakukan Laporan Stock opname Barang Persediaan Pakai Habis; ✓
14. Menyusun dan membuat laporan Barang triwulan, semester dan tahunan Barang Persediaan ;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
**KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

PENGELOLA DATA

SERAPUL ANAM, SE.MM

ARIF JIWANDONO

Pembina / IV a
NIP. 19681011 199403 1 007

Penata Muda Tk.I / III b
NIP. 19701120 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya dalam Menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penganggaran BMD.	Jumlah Pengadaan Barang sesuai dengan kebutuhan	Dokumen	1
2	Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BMD) agar memudahkan dalam melaksanakan Pengelolaan Pemafaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Adm. dalam pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang terproses	Laporan	1
3	Mendokumentasikan dan Membuat label kode/lokasi barang milik daerah (BMD) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib dalam administrasi dan pengelolaan;	Jumlah Label kode/lokasi yang di buat	Label	100
4	Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);	Jumlah Rekonsiliasi yang terlaksana	Kegiatan	4
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;	Jumlah hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang di laporkan	Kegiatan	3
6	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya administrasi dokumen SPK, PK dan IKI	Dokumen	3

7	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya administrasi laporan SKP Tahunan	Dokumen	2
8	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;	Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Dokumen	1
9	Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah ;	Jumlah hasil pelaksanaan yang dilaporkan	Laporan	48
10	Menyiapkan Usulan permohonanan Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD);	Jumlah Usulan permohonan penetapan status BMD	Berkas	1
12	Membuat dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah (BMD);	Jumlah Barang Milik Daerah yang Rusak Berat	Berkas	1
13	Menyusun dan membuat laporan Barang Triwulan, Semester dan Tahunan Barang Inventaris dan barang persediaan pakai habis;	Jumlah laporan triwulan, semester dan tahunan	Laporan	7
14	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan atasan	Laporan	10

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KASUBBAG UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina / IV a

NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,

PENGELOLA DATA,

ARIF JIWANDONO

Penata Muda Tk.I / III b

NIP. 19701120 199303 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMI MARIATI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.,M.M**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk Urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat Urusan Kepegawian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan;
8. Melaksanankan Tata Kelola Arsip Urusan Kepegawaian;
9. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Urusan Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko teradap layanan Administrasi Kepegawaian;

11. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
12. Tercapaiannya Kinerja Urusan Kepegawaian;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara berjenjang;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya;

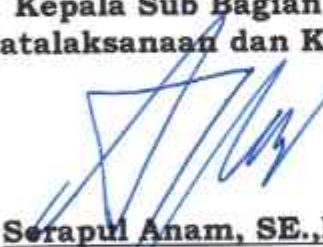
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**

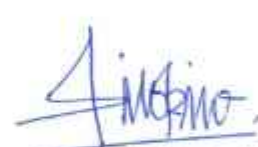


Serapil Anam, SE., M.M

Pembina / IVa

NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



Emi Mariati

Pengatur TK.I / IId

NIP. 19780509 200901 2 003

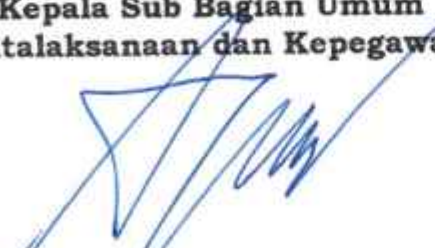
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dokumen	38
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses KAPEG,KARIS/ KARSU.	Jumlah Usulan Administrasi Kepegawaian KARPEG,KARIS/ KARSU yang terproses	Dokumen/Berkas	5
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses Cuti Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Cuti ASN terproses	Dokumen	10
4	Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SIASN Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Verifikasi data informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah	Aplikasi	2
5	Terlaksananya Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Daerah.	Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Dokumen	1
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Laporan	48

7	Terkoordinasinya Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen/Laporan	4
8	Ketersediaan data Pendukung Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan pertanggal 31 Maret 2025	Dokumen/Laporan	1
9	Ketersediaan data Pendukung Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya Administrasi Laporan PK dan IKI	Dokumen/Laporan	2
10	Ketersediaan data Pendukung Peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya Administrasi Laporan SKP Tahunan	Dokumen/Laporan	1
11	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Terlaksananya Tugas,Fungsi dan Melaksanakan Perintah Atasan	Dokumen/Laporan	12

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian**


Serapul Anam, SE.,M.M

Pembina / IVa

NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


Emi Mariati

Pengatur TK.I / IId

NIP. 19780509 200901 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULASTRI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE.,MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk Urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat Urusan Kepegawian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Dokumen	1
2	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya Admnistrasi Laporan PK dan IKI	Dokumen	2
3	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.	Terlaksananya Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah	Dokumen	1
4	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.	Terlaksananya Dokumen Peta Jabatan.	Dokumen	1

5	Ketersediaan data pendukung peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.	Terlaksananya Administrasi Laporan SKP Tahunan dan Rekapitulasi SKP Perangkat Daerah	Dokumen	2
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA	Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Laporan	48
7	Terkoodinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;	Jumlah Pelaksanan monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	dokumen	4
8	Menyiapkan,memproses data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiaan Surat Menyurat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian	surat	50
9	Menyiapkan,memproses data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiaan Rekapitulasi Kehadiran, Pemberian Sangsi, Penghargaan Aparatur Sipil .	dokumen	12

10	Menyiapkan,memproses data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN).	dokumen	5
11	Menyiapkan,memproses data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Proses Pensiun,Taspen dan Tapera dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	dokumen	3
12	Terlaksannya tugas dan Fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan yang diPerintahkan Atasan	dokumen	12

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


Serapul Anam, SE.,MM
Pembina / IV a
NIP. 19680111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


Sulastri
Pengatur / II c
NIP. 197811152012122001

8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Urusan Kepegawaian;
9. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Urusan Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap layanan Administrasi Kepegawaian;
11. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK
12. Tercapaiannya Kinerja Urusan Kepegawaian
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara berjenjang;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya;

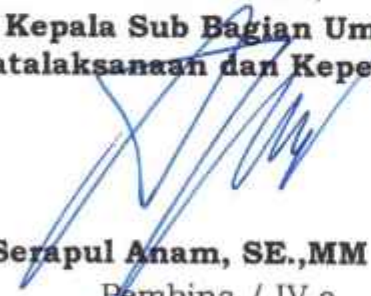
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

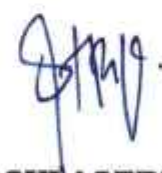
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian


Serapul Anam, SE.,MM
Pembina / IV a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


SULASTRI
Pengatur / II c
NIP. 19781115 201212 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERU SUKMONO**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE., MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATLAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



**SERAPUL ANAM, SE., MM
Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007**

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



**HERU SUKMONO
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 198009182010011017**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Tersedianya laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Pelaksanaan input ePantau 2025	Aplikasi	1
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah.	Jumlah Laporan Mengaji	Laporan	48
5.	Tersusunnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.	Jumlah Dokumen / Laporan pengawasan dan monev	Dokumen / Laporan	4
6.	Menyiapkan, memproses data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, pelaksanaan urusan umum ketatalaksanaan kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan umum ketatalaksanaan dan kepegawaian.	Kegiatan	5
7.	Terlaksannya tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah kegiatan terlaksana tugas dan fungsi kedinasan	Kegiatan	5

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATLAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



**SERAPUL ANAM, SE., MM
Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007**

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



**HERU SUKMONO
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 198009182010011017**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALFIANNUR**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM,SE.MM**

Jabatan : **KASSUBBAG. UMUM KETATALAKSANAAN & KEPEGAWAIN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyiapkan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
2. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BMD) agar memudahkan dalam melaksanakan Pengelolaan Pemafaatan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
4. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan
6. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan per tanggal 31 Maret 2025 ;
7. Menyiapkan Usulan permohonan penetapan status dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Membuat Laporan Stock opname Barang Persediaan Pakai Habis;

9. Menyusun dan membuat laporan Triwulan, semester dan tahunan Barang Milik Daerah (BMD)
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KASUBBAG. UMUM
KETATALAKSANAAN & KEPEGAWAIAN

SERAPUL ANAM, SE.MM
Pebina / IV a
NIP. 19681011 199403 1 007

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

ALFIANNUR
Pengatur Tk.I / II d
NIP. 198111025 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya dalam Menyiapkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Jumlah Pengadaan Barang sesuai dengan kebutuhan	Dokumen	1
2	Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah (BMD) agar memudahkan dalam melaksanakan Pengelolaan Pemafaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Adm. Dalam pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang terproses	Laporan	1
3	Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);	Jumlah Rekonsiliasi yang terlaksana	Laporan	4
4	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
5	Menyiapkan Usulan permohonan penetapan status dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);	Jumlah Dokumen Usulan permohonan penetapan status dan Penghapusan BMD	Dokumen	2

6	Menyusun dan membuat laporan Triwulan, semester dan tahunan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah laporan Triwulan, semester dan tahunan Barang Milik Daerah (BMD)	Laporan	3
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi yang di berikan atasan	Laporan	10
8	Ketersedian data pendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Terlaksananya administrasi laporan SKP, Perjanjian Kinerja (PK), IKI, dan SPT Tahunan	Laporan	4

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KASUBBAG. UMUM
KETATALAKSANAAN &
KEPEGAWAIAN

SERAPUL ANAM, SE.MM

Pembina / IV a
NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

ALFIANNUR

Pengatur Tk.I / II d
NIP. 19811025 200701 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SYAFII**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE., M. SI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Dokumen surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Dokumen lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.;
3. Surat/ dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Dokumentasi surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
5. Laporan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan;
8. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Arsip Inaktif Record Center Dinas Sosial;
9. Pemenuhan Ketersediaan Daya dan Informasi Bagian Umum Ketatalaksanaan;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap layanan Administrasi Umum Ketatalaksanaan;
11. Melaksanakan tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (Gema)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Laporan	48
2	Terkoordinasinya Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.	Jumlah Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.	Dokumen/ Laporan	1
3	Ketersediaan Data Pendukung Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Jumlah terlaksananya Administrasi Laporan PK dan IKI	Dokumen/ Laporan	2
4	Ketersediaan Data Pendukung Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Jumlah terlaksananya Administrasi Laporan Tahunan SKP	Dokumen/ Laporan	1
5	Tersusunnya kebijakan administrasi Urusan Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah SOP, SK, Rekomendasi dan Nota Dinas	Dokumen	3
6	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis ataupun lisan	Jumlah Kegiatan melaksanakan tugas kedinasan lainnya	Kegiatan	5

Kutai Kartanegara, 11 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


SERAPUL ANAM, SE.MM.
PEMBINA - IV/a
NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


MUHAMMAD SYAFII
PENGATUR TK. I - II/d
NIP. 19860521 201001 1 013

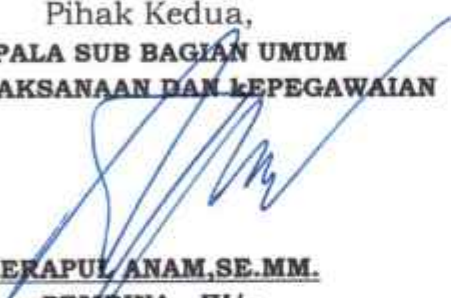
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 11 Februari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**



SERAPUL ANAM, SE.MM.
PEMBINA - IV/a
NIP. 19681011 199403 1 007

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



MUHAMMAD SYAFII
PENGATUR TK. I - II/d
NIP. 19860521 201001 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PRASETYO. K**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SERAPUL ANAM, SE. MM**

Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM , KETAALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM KETATA
LAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN**



SERAPUL ANAM, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



PRASETYO. K
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197504232008011017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.	Jumlah Dokumen / Laporan pengawasan dan monev	Dokumen / Laporan	4
2.	Menyiapkan, memproses data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, pelaksanaan urusan umum ketatalaksanaan kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan umum ketatalaksanaan dan kepegawaian.	Kegiatan	5
3.	Terlaksannya tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah kegiatan terlaksana tugas dan fungsi kedinasan	Kegiatan	5
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah.	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM KETATA
LAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


SERAPUL ANAM, SE, MM
Pembina IV/a
NIP. 196810111994031007

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


PRASETYO. K
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197504232008011017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs.YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan SPT Tahunan;
5. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah urusan Kepegawian;
6. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Urusan Kepegawaian sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
7. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Individu sesuai dengan data terkini;

8. Melaksanakan Internalisasi Core Values ASN "BerAKHLAK";
9. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN;
10. Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja secara berjenjang;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Selanjutnya :

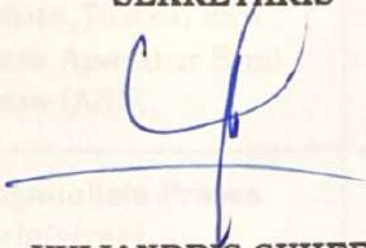
13. Menganalisis Administrasi Kepegawaian Proses Kenaiakan Pangkat dan Gaji Berkala Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Menganalisis Administrasi Kepegawaian Proses Pensiun,Taspen dan Tapera Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Menganalisis dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peta Jabatan Perangkat Daerah;
16. Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaiaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Rekapitulasi Kehadiran,Rekapitulasi Pemberian TPP, Pemberian Sangsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
17. Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaiaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Gaji ASN dan Pemberian TPP, Pemberian Sangsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 26.Menganalisis,Menyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah;
27. Menganalisis dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Dan Peta Jabatan Perangkat Daerah;
28. Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaiaan Cuti ASN;
29. Tata Kelola Arsip Bagian Kepegawaian;
30. Melakukan Proses Approval,update dan verifikasi data ASN pada aplikasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dan SiASN;
- 31.Monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian;
32. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah;
- 33.Melaksanakan kebijakan administrasi Urusan Kepegawaian dan pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Melaksanakan Perintah Atasan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina TK.I/ IV b
NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**


MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos., M.Si

Penata TK.I/ III d
NIP. 19790516 200112 1 001

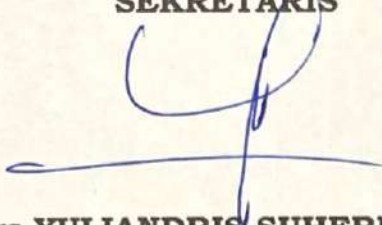
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terproses	Dokumen/Berkas	38
2	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Pensiun, Taspen dan Tapera Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Pensiun terproses	Dokumen/Berkas	3
3	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kenaikan Pangkat terproses	Dokumen/Berkas	5
4	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Gaji ASN dan Pemberian TPP, Pemberian Sangsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terproses	Dokumen/Berkas	24
5	Menganalisis, Menyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.	Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen	1

6	Menganalisis dan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dan Peta Jabatan Perangkat Daerah.	Dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Peta Jabatan Perangkat Daerah	Dokumen	2
7	Menganalisis Proses Administrasi Kepegawaiaan Cuti ASN	Jumlah Cuti ASN terproses	Dokumen	10
8	Tata Kelola Arsip Bagian Kepegawaian	Jumlah Arsip Bagian Kepegawaian	Dokumen	50
9	Proses Approval,update dan verifikasi data ASN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dan SiASN	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Aplikasi	2
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Laporan	12
11	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Laporan LHKPN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Dokumen/Laporan	3
12	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Melaksanakan Perintah Atasan	Terlaksananya Tugas,Fungsi dan Melaksanakan Perintah Atasan	Dokumen/Laporan	12

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina TK.I / IV b
NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA**



MOHD.ERY FAISYAL, S.Sos., M.Si

Penata TK.I / III d
NIP. 19790516 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZEIN WAHYUDI PASA, SP**
Jabatan : **PERENCANA MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Bidang Urusan Sosial;
2. Menyediakan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Menyediakan Laporan Forum Konsultasi Publik RENSTRA 2025 – 2029;
4. Menyediakan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Menyediakan Dokumen Data Sektoral Bidang Urusan Sosial;
6. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
7. Menyediakan Laporan Rekapitulasi data IKK Bidang Urusan Sosial;
8. Menyediakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau;
9. Menyediakan Laporan hasil entry RKPD / RENJA / RKA / DPA dalam aplikasi yang tersedia;
10. Menyampaikan LHKPN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
11. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
12. Melaksanakan kebijakan administrasi bidang Sekretariat;

13. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA


ZEIN WAHYUDI PASA. SP
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 197309282001121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Urusan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Urusan Sosial	Dokumen	2
2	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8
3	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik RENSTRA 2025 - 2029	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik RENSTRA 2025 - 2029	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan	1
5	Tersedianya Dokumen Data Sektoral Bidang Urusan Sosial	Jumlah Dokumen Data Sektoral Bidang Urusan Sosial	Dokumen	1
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
7	Tersedianya Laporan Rekapitulasi data IKK Bidang Urusan Sosial	Jumlah Laporan Rekapitulasi data IKK Bidang Urusan Sosial	Laporan	4
8	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau	Laporan	72
9	Tersedianya Laporan hasil entry RKPD / RENJA / RKA / DPA dalam aplikasi	Jumlah Laporan hasil entry RKPD / RENJA / RKA / DPA dalam aplikasi yang tersedia	Laporan	6

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	RENJA / RKA / DPA dalam aplikasi yang tersedia			
10	Tersedianya Laporan LHKPN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan LHKPN dan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	2
11	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
12	Terlaksananya kebijakan administrasi bidang Sekretariat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan, Telaahan Staff, dll	Dokumen	12
13	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	12

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	APBD
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	APBD
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	250.000.000,00	APBD
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1.000.000.000,00	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA


ZEIN WAHYUDI PASA, SP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197309282001121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KANTI MULATI, S.Sos**
Jabatan : **PENGELOLA DATA**

Selanjutnya disebut Pihak

Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan Kegiatan Urusan Keuangan;
2. Menyampaikan Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
3. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
5. Menyediakan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau;
6. Melaksanakan kebijakan administrasi bidang Sekretariat;
7. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Kegiatan Urusan Keuangan	Jumlah Kegiatan Urusan Keuangan	Kegiatan	1
2	Tersedianya Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
4	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan melalui e-pantau	Laporan	48
5	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
6	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	12
7	Terlaksananya kebijakan administrasi bidang Sekretariat;	Jumlah Dokumen Kebijakan Administrasi Bidang Sekretariat	Dokumen	3

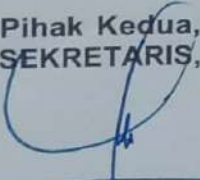
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA

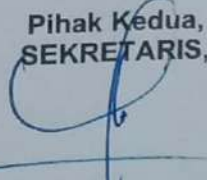

KANTI MULATI, S.Sos
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 196806061994012002

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

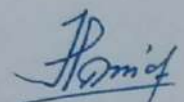
NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.355.493.667	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semersteran SKPD	140.000.000	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		10.770.493.667	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA


KANTI MULATI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196806061994012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HABIBI HIDAYAT**

Jabatan : **PENGATUR TK.1**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyiapkan bahan Laporan Keuangan Dinas Sosial;
2. Menyampaikan Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
3. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
5. Membuat laporan pembukuan mutasi keuangan sehingga tercatat secara lengkap, dan akurat;
6. Tersusunnya Laporan SPJ Bendahara Pengeluaran;
7. Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan data surat permintaan pembayaran (SPP);
8. Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan data daftar gaji dan tunjangan pegawai;
9. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
10. Terlaksananya pemungutan dan penyetoran pajak negara ke rekening kas negara dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Terlaksananya kebijakan administrasi bidang Sekretariat
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Laporan Keuangan Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Dinas Sosial	Laporan	1
2	Tersediannya Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
3	Tersediannya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
4	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
5	Terlaksananya pembukuan atas setiap mutasi keuangan tercatat dengan lengkap dan akurat	Jumlah laporan pembukuan mutasi keuangan sehingga tercatat secara lengkap, dan akurat;	Berkas	200
6	Tersediannya Laporan SPJ Bendahara	Jumlah Laporan SPJ Bendahara	Laporan	12
7	Membuat SPP UP, SPP GU, SPP Gaji dan Tunjangan ASN, dan SPP LS sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Berkas Surat Perintah Pembayaran (SPP)UP/GU/Gaji dan Tunjangan ASN/LS yang disusun	Dokumen	50
8	Terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan data daftar gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah daftar gaji dan tunjangan pegawai yang dikeluarkan dan disusun	Dokumen	14
9	Terlaksananya kebijakan administrasi bidang Sekretariat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan, Telaahan Staff, dll	Dokumen	10

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
10	Terlaksananya pemungutan dan penyetoran pajak negara ke rekening kas negara dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan pajak yang dipungut dari transaksi yang kena pajak	Laporan	12
11	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	12

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PERENCANA MUDA


HABIBI HIDAYAT
Pengatur Tk. 1 (II/d)
NIP. 198110012006041019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak

Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyampaikan laporan SPT Tahunan per tanggal 31 Maret 2025;
2. Menyampaikan dokumen PK, IKI, SKP;
3. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
4. Melaksanakan verifikasi berkas penagihan keuangan;
5. Melaksanakan pengelolaan arsip urusan keuangan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan SPT tahunan per tanggal 31 Maret 2025	Jumlah laporan SPT tahunan per tanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah laporan pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
4	Terlaksananya Verifikasi Berkas Penagihan Keuangan	Jumlah verifikasi berkas penagihan keuangan	Berkas	100
5	Terlaksananya Pengarsipan di Bidang Keuangan	Jumlah arsip urusan keuangan yang dikelola	Berkas	100
6	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	12

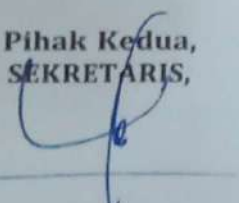
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

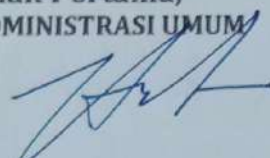
Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


HASANUDDIN

Pengatur II/c

NIP. 198507302012121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD BAIHAKI**

Jabatan : **VERIFIKATOR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan tata kelola core values ASN "Ber-AKHLAK";
2. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;
3. Mengumpulkan dan memeriksa data perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
6. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan Tata kelola Arsip perangkat daerah;
8. Tercapainya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah;
9. Melakukan pencatatan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan;
10. Menyediakan data pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
12. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;
14. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
15. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

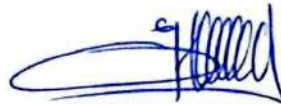
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

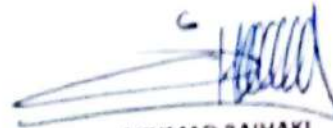
PIHAK PERTAMA
VERIFIKATOR,



AKHMAD BAIHAKI
Pengatur Tk I (II/d)
NIP. 19820907 201001 1 002

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
VERIFIKATOR,



AKHMAD BAIHAKI
Pengatur Tk I (II/d)
NIP. 19820907 201001 1 002

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS,



DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meneliti dan Mencocokkan Bukti-Bukti Pengeluaran dan Penerimaan Dengan Laporan Realisasi Keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya	Dokumen data Pembayaran melalui UP/GU/TUP	Berkas	750
		Data Pembayaran LS Melalui Pengadaan Langsung	Berkas	25
		Dokumen Pendukung Pengajuan SPP-UP/LS untuk kegiatan	Berkas	375
		Berkas / Tagihan Permintaan Pembayaran	Berkas	3000
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan LKHSN / Pajak	Laporan	1
3	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "Ber-AKHLAK"	Mengikuti Apel Pagi Setiap Hari Senin	Kegiatan	1
4	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan " Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
5	Tersedianya Dokumen PK , IKI , SKP	Jumlah Dokumen PK,IKI,SKP	Dokumen	3
6	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintahan	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUKANDAR, SST., MPSSp**
Jabatan : **KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyediakan Dokumen yang terkait dengan proses kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di UPT. Loka Bina Karya;
2. Menyediakan Laporan Rekapitulasi penerima manfaat yang terkait dengan proses kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di UPT. Loka Bina Karya;
3. Menyediakan Laporan Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS UPT. Loka Bina Karya;
4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
5. Menyampaikan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
6. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
7. Melaksanakan kebijakan Administrasi UPT. Loka Bina Karya;
8. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

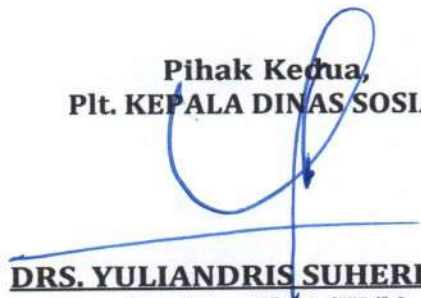
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
KEPALA UPT LOKA BINA KARYA

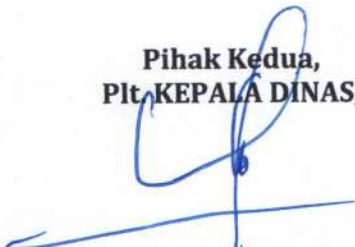

SUKANDAR. SST., MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2.	Tersedianya Laporan Rekapitulasi penerima manfaat kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Orang	50
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS UPT. Loka Bina Karya	Jumlah Penerima Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS	Orang	50
4.	Tersedianya Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
5.	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
6.	Terlaksananya kebijakan administrasi UPT. Loka Bina Karya	Jumlah Dokumen Surat Keputusan, Telaahan Staff, dll	Dokumen	50
7.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Laporan	10

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
8.	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	5

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS,


DRS. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA


SUKANDAR. SST., MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SOFIAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUKANDAR, SST., MPSSp.**
Jabatan : **KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyediakan Dokumen yang terkait dengan proses kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di UPT. Loka Bina Karya;
2. Menyediakan Laporan Rekapitulasi penerima manfaat yang terkait dengan proses kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di UPT. Loka Bina Karya;
3. Menyediakan Laporan Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS UPT. Loka Bina Karya;
4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
5. Menyampaikan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
6. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
7. Melaksanakan kebijakan Administrasi UPT. Loka Bina Karya;
8. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**



SUKANDAR. SST., MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004

**Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT. LOKA BINA KARYA**



AGUS SOFIAN. SE
Penata Muda TK I (III/b)
NIP. 19801204 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2.	Terlaksananya Pelayanan PMKS Terlantar ke daerah asalnya	Jumlah Laporan PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Orang	50
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS UPT. Loka Bina Karya	Jumlah Penerima Realisasi Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PMKS	Orang	50
4.	Tersedianya Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
5.	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
6.	Terlaksananya kebijakan administrasi UPT. Loka Bina Karya	Jumlah Dokumen Surat Keputusan, Telaahan Staff, dll	Dokumen	25
7.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Laporan	10
8.	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	5

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA



SUKANDAR. SST. MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT. LOKA BINA KARYA



AGUS SOFIAN. SE
Penata Muda TK I (III/b)
NIP. 19801204 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEK WIDYANINGSIH, S.IK, Humas**

Jabatan : **KASUBAG TU UPTD. PSAA. ODAH NGASOH KANAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA UPTD. PSAA. ODAH NGASOH KANAK**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Terlantar;
2. Melaksanakan Peningkatan Kepuasan Masyarakat;
3. Menyediakan Bukti Dukung laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA);
6. Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di UPTD;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan dipertanggung jawabkan.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA UPTD. PSAA. ODAH
NGASOH KANAK**



KUN DWI ROHMANI, S.Sos
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19681221 200312 1 002

Pihak Pertama,
**KASUBAG TU UPTD. PSAA. ODAH
NGASOH KANAK**



WIWIEK WIDYANINGSIH, S.IK, Humas
Penata Tk. I - III/d
NIP. 19780907 201101 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS YADIANSYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUN DWI ROHMANI**

Jabatan : **Kepala UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Dinas Sosial**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Tersedianya bahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup UPTD
2. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji di UPTDM
3. Terlaksananya kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan di UPTD
4. Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
5. Terlaksananya peningkatan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan anak asuh
6. Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh di UPTD PSAA "Odah Ngasoh Kanak

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**Kepala UPTD Pelayanan Sosial
Asuhan Anak
Dinas Sosial**

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



KUN DWI ROHMANI
Penata Tinkar I / III d
NIP. 196802271994022002



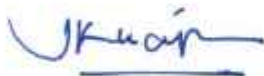
AGUS YADIANSYAH
Pengatur Tingkat I / II/d
NIP. 19781115 201212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya bahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup UPTD	Jumlah Usulan Aparatur Sipil Negara Pensiun yang terlayani	Dokumen/Berkas	3
2	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji di UPTDM	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terproses	Dokumen	13
3	Terlaksananya kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan di UPTD	Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah	Dokumen	1

4	Terlaksananya tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan	Dokumen Peta Jabatan.	Dokumen	1
5	Terlaksananya peningkatan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan anak asuh	Jumlah tata kelola Arsip urusan Kepegawaian	Dokumen/Berkas	50
6	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar bagi Anak Asuh di UPTD PSAA "Odah Ngasoh Kanak	Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Dokumen	1

Pihak Kedua,
Kepala UPTD Pelayanan Sosial
Asuhan Anak
Dinas Sosial



KUN DWI ROHMANI
 Penata Tinkar I / III d
 NIP. 196802271994022002

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
 Pihak Pertama,

Pengadministrasi Umum



AGUS YADIANSYAH
 Pengatur Tingkat I / II/d
 NIP. 19781115 201212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKA PUTRA, SE**
Jabatan : **PENGOLAH DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUKANDAR, SST., MPSSp.**
Jabatan : **KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyediakan Dokumen yang terkait dengan proses kegiatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di UPT. Loka Bina Karya;
2. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
3. Menyampaikan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025;
4. Menyampaikan Dokumen PK, IKI, SKP;
5. Melaksanakan kebijakan Administrasi UPT. Loka Bina Karya;
6. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

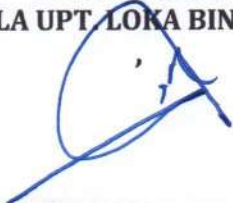
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA**



**SUKANDAR, SST., MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004**

**Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA
UPT. LOKA BINA KARYA**



**EKA PUTRA, SE
Penata TK I (III/d)
NIP. 19741118 20001 21003**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2.	Tersedianya Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Jumlah Laporan SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Laporan	1
3.	Tersedianya Dokumen PK, IKI, SKP	Jumlah Dokumen PK, IKI, SKP	Dokumen	3
4.	Terlaksananya kebijakan administrasi UPT. Loka Bina Karya	Jumlah Dokumen Surat Keputusan, Telaahan Staff, dll	Dokumen	25
5.	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di perangkat daerah	Jumlah Laporan Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di perangkat daerah	Laporan	10
6.	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Laporan	5

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPT. LOKA BINA KARYA



SUKANDAR. SST., MPSSp
Pembina (IV/a)
NIP. 19680414 199201 1 004

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA
UPT. LOKA BINA KARYA



EKA PUTRA. SE
Penata TK I (III/d)
NIP. 19741118 20001 21003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL

LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
14.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16.	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97

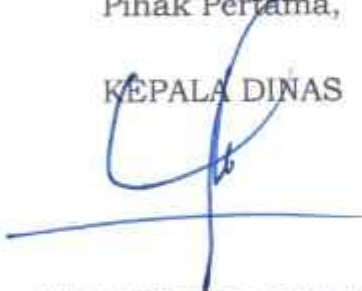
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000	APBD
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 6.095.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.6.170.000.000	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRA. HJ. RUSMINAH
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028



DRA. HJ. RUSMINAH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19670512 199002 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang yang terlaksana	Berkas	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten yang terlaksana	Berkas	1
3	Terlaksananya Program Penyuluhan Sosial	Program Penyuluhan Sosial yang terlaksana dan dilaporkan	Laporan	5
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan	1
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
6	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	5
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
8	Terlaksananya Rapat Evaluasi standar pelayanan	Rapat Evaluasi Standar Pelayanan yang Terlaksana	Dokumen	2
9	Mengumpulkan Bahan - Bahan Ksedian Data Pekerja Sosial Masyarakat	Bahan - Bahan Ksedian Data Pekerja Sosial Masyarakat tersedia	Data	20
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	5
11	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5

12	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	5
13	Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang (Prognosis Sub Kegiatan PUB & PSM)	Dokumen Prognosis Sub Kegiatan Sub Kegiatan PUB & PSM	Dokumen	5
14	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Kebijakan administrasi Bidang Sosial yang tersusun	Dokumen	5
15	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5

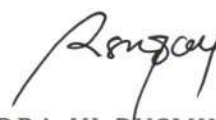
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028



DRA. HJ. RUSMINAH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19670512 199002 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SAFITRI RAMDHANI, SE., M.Si
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


ADI SAFITRI RAMDHANI, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790817 200112 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten yang terlaksana	Berkas	1
2	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan LK3	Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan LK3 yang terlaksana	Berkas	1
3	Terlaksananya Program Penyuluhan Sosial	Program Penyuluha Sosial yang terlaksana dan dilaporkan	Laporan	10
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan	1
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
6	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
8	Terlaksananya Rapat Evaluasi standar pelayanan	Rapat Evaluasi Standar Pelayanan yang Terlaksana	Dokumen	2
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Manajemen Resiko	Dokumen SPIP - Manajemen Resiku	Dokumen	3
10	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data Puskesmas Zona Pantai	Bahan - Bahan Kesedian Data Puskesmas tersedia	Data	20
11	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data Lembaga Kesejahteraan Sosial	Bahan - Bahan Kesedian Data Lembaga Kesejahteraan Sosial tersedia	Data	350

12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	10
13	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
14	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12
15	Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang (Prognosis Sub Kegiatan Kelembagaan & LK3)	Dokumen Prognosis Sub Kegiatan Kelembagaan & LK3	Dokumen	12
16	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Kebijakan administrasi Bidang Sosial yang tersusun	Dokumen	5
17	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


ADI SAFITRI RAMDHANI, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790817 200112 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRI, SE
Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

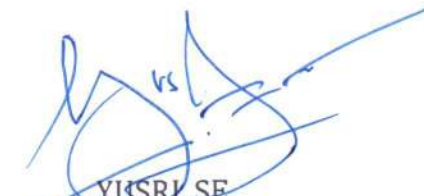
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



YUSRI SE
Penata (III/c)
NIP. 19790416 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten yang terlaksana	Berkas	1
2	Terlaksananya Program Penyuluhan Sosial	Program Penyuluhan Sosial yang terlaksana dan dilaporkan	Laporan	10
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan Kepatuhan Penyampaian LHKPN	Laporan	1
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
7	Terlaksananya Rapat Evaluasi standar pelayanan	Rapat Evaluasi Standar Pelayanan yang Terlaksana	Dokumen	2
8	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data TKSK	Bahan - Bahan Kesedian Data TKSK tersedia	Data	20
9	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data Puskesmas Zona Tengah	Bahan - Bahan Kesedian Data Puskesmas Zona Tengah tersedia	Data	267
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
11	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5

12	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12
13	Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang (Prognosis Sub Kegiatan TKSK)	Dokumen Prognosis Sub Kegiatan TKSK	Dokumen	12
14	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Kebijakan administrasi Bidang Sosial yang tersusun	Dokumen	5
15	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

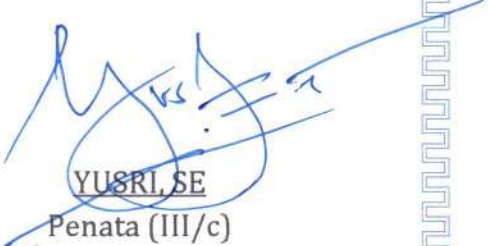
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028


YUSRI, SE

Penata (III/c)

NIP. 19790416 200701 1 016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHAIR, S.Sos, M.Si
Jabatan : ANALIS MASALAH SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannnya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

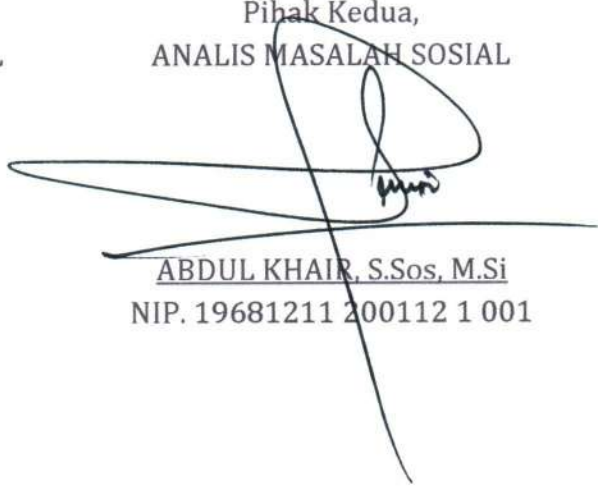
Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
ANALIS MASALAH SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028



ABDUL KHAIR, S.Sos, M.Si
NIP. 19681211 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menelaah, mempelajari, menganalisis dan mengevaluasi Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Dokumen Laporan TKSK yang tersedia	Dokumen	120
2	Menelaah, mempelajari, menganalisis mengevaluasi dan Merekap laporan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	Dokumen Laporan Puskesmas yang Tersedia	Dokumen	1068
3	Telaksanakan Notutis rapat-rapat Bidang Pemberdayaan Sosial	Dokumen Notutis rapat-rapat Bidang Pemberdayaan Sosial terlaksana	Dokumen	10
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
5	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
8	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
9	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

10	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5
----	--	--	---------	---

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
ANALIS MASALAH SOSIAL


ABDUL KHAIR, S.Sos, M.Si
NIP. 19681211 200112 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos
Jabatan : ANALIS MASALAH SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Kedua,
ANALIS MASALAH SOSIAL



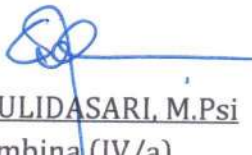
ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos
NIP. 19790402 201001 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menelaah, mempelajari, menganalisis dan mengevaluasi Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Dokumen Laporan TKSK yang tersedia	Dokumen	120
2	Menelaah, mempelajari, menganalisis mengevaluasi dan Merekap laporan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	Dokumen Laporan Puskesmas yang Tersedia	Dokumen	960
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Manajemen Resiko	Dokumen SPIP - Manajemen Resiko	Dokumen	3
7	Menghimpun & Mengelola Data-data Bidang (Satu Data Dayasos)	Menghimpun & Mengelola Data-data Bidang yang tersedia	Data	980
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
9	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
10	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

11	Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang dan Pengelolaan Aplikasi seperti Srikandi, SIPD, RPJMD, E-Pantau dan lainnya	Program Kerja dan Aplikasi Bidang yang terlaksana	Dokumen	20
12	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial	Kebijakan administrasi Bidang Sosial yang tersusun	Dokumen	5
13	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)

NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
ANALIS MASALAH SOSIAL


ARIS TEGUH RAHAYU, S.Sos

NIP. 19790402 201001 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASDIAN NOOR
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI UMUM



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028



ASDIAN NOOR
NIP. 19690816 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun, Mencatat dan Mengadimistrasikan Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Dokumen Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang tersedia	Berkas	1
2	Menghimpun, Mencatat dan Mengadimistrasikan Dokumen Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Dokumen Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten tersedia	Berkas	1
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
6	Menghimpun, Mencatat dan Mengadimistrasikan Data Bidang (Satu Data Dayasos)	Data Bidang bidang yang tersedia	Data	480
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
8	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
9	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

10	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5
----	--	--	---------	---

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASI UMUM


ASDIAN NOOR
NIP. 19690816 200902 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASMINAR WATI, S.Sos
Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENGOLAH DATA



ASMINAR WATI, S.Sos
NIP. 19811118 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Mengolah dan Menyajikan Penatausahaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Dayasos	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Dayasos tersedia Penataushannya	Berkas	5
2	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
5	Tatakelola Arsip Bidang Dayasos	Arsip Bidang Dayasos yang terkelola	Arsip	200
6	Mengumpulkan dan Memeriksa Data Bidang (Satu Data Dayasos)	Data Bidang bidang yang tersedia	Data	480
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
8	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
9	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

10	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5
----	--	--	---------	---

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGOLAH DATA



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028



ASMINAR WATI, S.Sos
NIP. 19811118 200112 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJANI
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASIAN UMUM


MARJANI
NIP. 19821112 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menghimpun, mencatat dan Mengadimistrasikan Berkas Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten yang terberkaskan	Berkas	20
2	Menghimpun, mencatat dan Mengadimistrasikan Berkas Laporan TKSK	Berkas Laporan TKSK	Berkas	20
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
6	Menghimpun, Mencatat dan Mengadimistrasikan Data Bidang (Satu Data Dayasos)	Data Bidang bidang yang tersedia	Data	480
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
8	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
9	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

10	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5
----	--	--	---------	---

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pihak Kedua,
PENGADMINISTRASIAN UMUM


LUCY YULIDASARI, M.Psi

Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028


MARIANI

NIP. 19821112 201001 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SADIANSYAH, SH.I
Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCY YULIDASARI, M.Psi
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

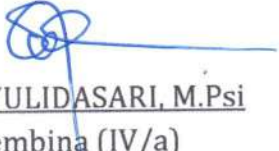
1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Perangkat Daerah ;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Kepatuhan laporan Perhitungan Pajak (SPT Tahunan) ;
3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Sosial;
4. Melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (Gema);
6. Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang;
7. Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Sosial;
8. Terlaksannnya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan;
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

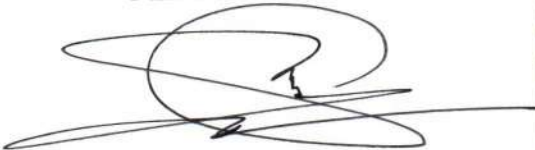
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Kedua,
PENGELOLA DATA



SADIANSYAH, SH.I
NIP. 19720916 200701 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyusun dan merekapitulasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Dayasos	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Objek kerja	Berkas	5
2	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Laporan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen	1
3	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP	Dokumen Kepatuhan SPT yang disampaikan	Dokumen	12
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu yang tersusun	Dokumen	2
5	Tatakelola Arsip Bidang Dayasos	Arsip Bidang Dayasos yang terkelola	Arsip	200
6	Mengumpulkan dan Memeriksa Data Bidang (Satu Data Dayasos)	Data Bidang bidang yang tersedia	Data	480
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Bidang Dayasos	Laporan Gerakan Etam Mengaji yang terlaksana	Laporan	12
8	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang sosial yang terkoordinasi	Dokumen	5
9	Terlaksananya Laporan Harian Kerja Bulanan Kepada Atasan	Laporan Kerja Harian yang disampaikan ke Atasan	Laporan	12

10	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan yang terlaksana	Dokumen	5
----	--	--	---------	---

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



LUCY YULIDASARI, M.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
PENGELOLA DATA



SADIANSYAH, SH.I
NIP. 19720916 200701 1 016



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial;
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
4. Melaksanakan peningkatan Kepuasan Masyarakat;
5. Melaksanakan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah;
7. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan SP4N Laporan;
8. Melaksanakan input data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
9. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
10. Melaksanakan peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Melaksanakan peningkatan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani;
13. Melaksanakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
14. Melaksanakan peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
15. Mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah;
16. Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal;
17. Melaksanakan program Pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah;
18. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
19. Melaksanakan penyusunan kebijakan administrasi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.

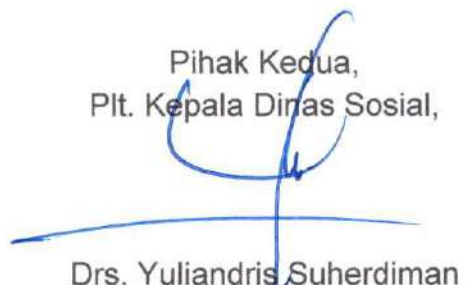
Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Sosial,



Drs. Yuliandris Suherdiman
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP.19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,



Sunarko, SST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710907 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	Persentase pihak yang terkait dalam proses pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan ke tempat asalnya	Persen	100
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	Persen	100
3	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Persen	100
4	Terlaksananya peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98%
5	Terlaksananya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82
6	Terlaksananya peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
7	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,3
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3

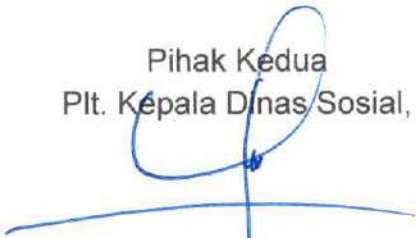
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan	48
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
17	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
18	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

19	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
20	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan	Kegiatan	50

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	KEGIATAN	ANGGARAN
		APBD
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasidi Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;	50.000.000,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangDisabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar sertaGelandangan Pengemis di luar panti sosial;	4.818.500.000,00
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	690.000.000,00

Pihak Kedua
Plt. Kepala Dinas Sosial,


Drs. Yuliandris Suherdman
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680708 199403 1 013

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,


Sunarke, SST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19710907 199401 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BERTILIA YULIDA
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan pelayanan dasar Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah
2. Terlaksana Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
3. Menyediakan Data Anak Korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah
4. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di perangkat Daerah
5. Menyediakan Data Anak Korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah
6. Ketersedian Data Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Korban Tindak Kekerasan
7. Menyediakan Data Dukung IKK Dinas Sosial
8. Terlaksananya Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

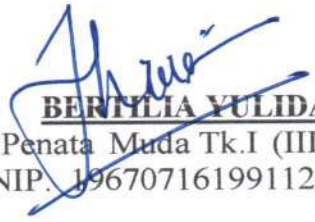
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


SUNARKO. SST., M.Si
Pembina (IV /a)
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


BERTILIA YULIDA
Penata Muda Tk.I (III /b)
NIP. 196707161991122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Pemenuhan kebutuhan dasa bagi Anak Korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah	Persentase pihak terkait Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Persen	100
2	Terlaksana Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	Jumlah Data pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Korban Tindak Kekerasan	Dokumen	12
3	Terinputnya data Penyelenggaraan satu data Indonesia	Persentase ketersediaan data korban Tindak Kekerasan atau di perlakukan salah	Persen	100
4	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji	Laporan	48
5	Tersedia data dukung penyusunan LPPD	Persentase ketersediaan Data Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah	Persen	100
6	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedia Data Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Anak Korban Tindak Kekerasan Persentase Ketersediaan Data	Data	12
7	Terlaksananya Capaian Indikator Kinerja kunci Perangkat Daerah	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Anak Korban Tindak Kekerasan	persen	100
8	Terlaksananya Tugas Kedinasan lainnya baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan tusi bidang	kegiatan	50

KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL



SUNARKO, SST., M.Si

Pembina (IV /a)

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



BERTINA YULIDA

Penata Muda Tk.I (III /b)

NIP. 196707161991122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASYADI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan pelayanan dasar yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Menyediakan data pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar.
3. Melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terhadap Anak Terlantar.
4. Melaksanakan input data penyelenggaraan Satu Data Indonesia
5. Melaksanakan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di perangkat Daerah
6. Ketersedian Data Anak Terlantar
7. Tersedianya Data Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Aanak Terlantar
8. Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

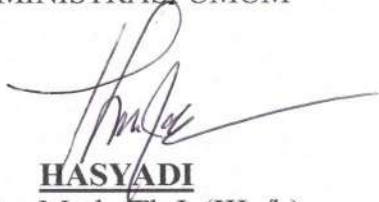
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL


SUNARKO, SST., M.Si
Pembina (IV /a)
NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


HASYADI
Penata Muda Tk.I (III /b)
NIP. 196907091993011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. MURNIYATI, SE
Jabatan : ANALIS MASALAH SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
3. Menyediakan bahan pendukung penyusunan Manajemen Risiko Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS selain korban NAPZA dan HIV/AIDS;
4. Melaksanakan Pemenuhan Ketersediaan Data Tersusunnya rancangan inovasi pelaporan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara mandiri;
5. Melaksanakan Pemenuhan ketersediaan data dukung "Satu Data Indonesia";
6. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat daerah;
7. Melaksanakan Pemenuhan ketersediaan data dukung penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD);

8. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Melaksanakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
10. Melaksanakan Pemenuhan ketersediaan data dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial;
11. Melaksanakan Pemenuhan ketersediaan bahan penyusunan alat ukur Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di bidang Rehsos dan Penanganan Migran Korban Tindak Kekerasan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PWNMKT



SUNARKO. S. ST. M. SI

Pembina (IV/a)

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,

ANALIS MASALAH SOSIAL



HJ. MURNIYATI SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19770829 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Persentase Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100
2	Terlaksannya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Shelter Dinas Sosial	Bulan	12
3	Tersedianya bahan pendukung penyusunan Manajemen Risiko Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS selain korban NAPZA dan HIV/AIDS	Dokumen Pendukung Penyusunan Manajemen Risiko dan Penilaian Risiko triwulan	Dokumen	5
4	Tersusunnya rancangan inovasi pelaporan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara mandiri	Form Pelaporan Mandiri Masalah Kesejahteraan Sosial (Lapor Mas)	Inovasi	1
5	Tersedianya data dukung "Satu Data Indonesia"	Persentase ketersediaan data Anak Berhadapan dengan Hukum secara periodik	Persen	100
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
7	Tersedianya data dukung penyusunan LPPD	Ketersediaan data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Persen	100
8	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya data pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	Bulan	12

9	Terlaksananya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan dokumen penilaian Kualitas Pelayanan Publik	Persen	100
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Persen	100
10	Tersedianya data dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial	persentase ketersediaan data dukung	Persen	100
11	Tersedianya bahan penyusunan alat ukur Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di bidang Rehsos dan Penanganan Migran KTK	Jumlah dokumen	Dokumen	2
12	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasa baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Kegiatan	50

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PWNMKT



SUNARKO. S.ST., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,
ANALIS MASALAH SOSIAL



HJ. MURNIYATI SE

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19770829 200112 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmidawati, SE
Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sunarko, SST. MSi
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi Anak Terlantar
2. Terlaksananya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
3. Terlaksananya peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terhadap Anak Terlantar
4. Tersedianya bahan pendukung penyusunan Manajemen Risiko Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya
5. Tersedianya data dukung "Satu Data Indonesia"
6. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah
7. Tersedianya data dukung penyusunan LPPD
8. Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Terlaksananya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10. Terlaksananya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
11. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar sesuai SPM
12. Tersedianya data dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial
13. Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Atasan Baik

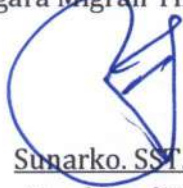
Pihak Kedua :

1. Melakukan supervise melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan
Warga Negara Migran Tindak Kekerasan



Sunarko. SST. MSi

Pembina (IV/a)

NIP. 19710907 199401 1 002

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pengolah Data Dan Informasi



Asmudawati, SE

Penata { III/c }

NIP. 197605262007012015

TUGAS SEBAGAI PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi Anak Terlantar	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanandasar bagi Anak Terlantar	Data	100%
2	Terlaksannya peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Melaksanakan peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Data	12
		Dokumen SKP 2024, SKP Awal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), SPT Pajak Tahunan	Dokumen	5
3	Terlaksananya peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terhadap Anak Terlantar	Melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terhadap Anak Terlantar	Dokumen Surve	88.30
4	Tersedianya bahan pendukung penyusunan Manajemen Risiko Program Rahabilitasi Sosial Kegiatan Rahabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya	Menyediakan bahan pendukung penyusunan Manajemen Risiko Program Rahabilitasi Sosial Kegiatan Rahabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya	Dokumen	5
5	Tersedianya data dukung "Satu Data Indonesia"	Menyiapkan Data Anak Terlantar	Data	100%
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kegiatan	48
7	Tersedianya data dukung penyusunan LPPD	Ketersediaan Data Anak Terlantar	Data	100%
8	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Melaksanakan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	12
9	Terlaksananya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Melaksanakan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	Dokumen	1
10	Terlaksananya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Melaksanakan Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Data	100%
11	Terlaksannya pemenuhan kebutuhan Dsar Anak Terlantar sesuai SPM	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Terlantar sesuai SPM	Data	100%

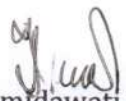
12	Tersediannya data dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial	Menyediakan Data dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial	Data	100%
13	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan Baik	Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan Atasan	Kegiatan	50

Kutai Kartanegara, 02 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan
warga Negara Migran Tindak Kekerasan

Pihak Kedua,
Pengolah Data Dan Informasi

Sunarko. SST. MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19710907 199401 1 002


Asmi Dawati, SE
Penata (III/c)
NIP. 197605262007012015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mawardi

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sunarko, SST., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Anak dengan kedisabilitasan
2. Melaksanakan peningkatan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;
3. Melaksanakan peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas dan Anak Dengan Kedisabilitasan;
4. Melaksanakan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas Telantar dan Anak Dengan Kedisabilitasan;
5. Menyediakan data Penyandang Disabilitas dan Anak dengan kedisabilitasan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
6. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah;
7. Menyediakan data penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan sebagai data dukung penyusunan LPPD;
8. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyediaan data pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan;
9. Menyediakan data IKK Outcome dan IKK Output Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
10. Melaksanakan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Menyediakan data dukung Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial;
12. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitasan sesuai SPM;
13. Menyediakan dukung program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pihak Kedua

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini,
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,



SUNARKO SST, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197109071994011002

Pihak Pertama,



M. MAWARDI

Pengatur Tk I (II.d)

NIP. 197909082009021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD RIANSYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUNARKO, SST.,M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN TINDAK
KEKERASAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
Gema Gerakan Mengaji
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Sesuai Standar Pelayanan Minimal;
16. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
17. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
18. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten;
19. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

KutaiKartanegara, 21 Januari 2025

Pihak kedua,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN



SUNARKO.S.ST..M.Si
Pembina (IV /a)
NIP.197109071994011002

Pihak pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM



AKHMAD RIANSYAH
Penata muda Tingkat I(III/b)
NIP.197412042001121005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar
2. Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
4. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Melaksanakan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Melaksanakan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
8. Meningkatkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
9. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah
10. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

12. Melaksanakan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
13. Melaksanakan Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
14. Melaksanakan Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah
15. Melaksanakan Penurunan Prevalensi Stunting
16. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Linjamsos
17. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang Linjamsos
18. Melaksanakan kebijakan administrasi bidang Linjamsos
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

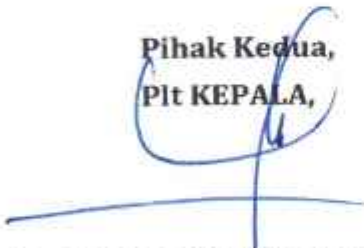
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt KEPALA,


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP.
19680708 199403 1 013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS


AHMAD FAHRUJI ST. MM
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19781208 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	98
2	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	Nilai	82
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3

7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
13	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

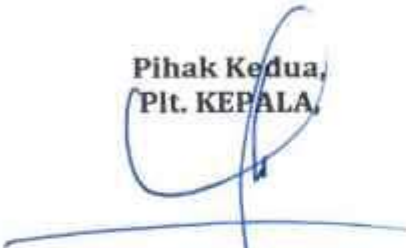
14	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
15	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Presentase Angka Kemiskinan	Persen	6,97
16	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1
17	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Buah	5
18	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Buah	4
19	Melaksanakan kebijakan administrasi bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Buah	4

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemeliharaan Anak Terlantar	1.000.000.000	APBD
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupate/ Kota	6.033.800.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.033.800.000	APBD

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Plt. KEPALA,**


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 196404091988031013

**Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS**


AHMAD FAHRUL ST., MM
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19690108 199403 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHAMDI,SE**

Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Program Keluarga Harapan.
2. Menganalisa materi sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi penerima program keluarga sejahtera, Program Kesehatan dan Program Keluarga Harapan.
3. Mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penerima program keluarga sejahtera, Program Jaminan Kesehatan program keluarga harapan.
4. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Program Keluarga Harapan.
5. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat.
6. Menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan, bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial

bagi penerima program keluarga sejahtera program jaminan Kesehatan dan program keluarga harapan.

7. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang jaminan sosial;
8. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) dan rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya.
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
10. Melaksanakan tata Kelola Arsip perangkat daerah.
11. Melakukan Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


AKHMADI,SE
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197215152009021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terpenuhinya Pengelolaan Data PMKS	Persentase pengelolaan data DTKS Cakupan Kab/Kota	Persen	80
2	Terlaksananya Sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan data Fakir miskin Cakupan Kab/Kota	Nilai SAKIP	Persen	80
3	Terpenuhinya data terkait Forum Konsultasi Publik Bidang Linjamsos	Jumlah Pelaporan data dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Bidang Linjamsos	Laporan	1
4	Terlaksananya penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor Pendataan DTKS Cakupan Kab/Kota	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	90
6	Terinputnya data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah Kesejahteraan Keluarga sosial di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Sosial keluarga	Laporan	12
8	Terlaksananya keikutsertaan dalam	Jumlah keikutsertaan	Kegiatan	1

	Peningkatan SDM/ Bimtek			
9	Terlaksananya Pelayanan Publik pada masyarakat di Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen Layanan	Dokumen	12
10	Terpenuhinya data Capaian IKK Bidang Linjamsos	Persentase Capaian IKK Bidang Linjmasos	Persen	100
11	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
12	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Linjamsos	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2
13	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
14	"Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan."	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	6

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I / III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


AKHMADI, SE
Penata TK. I / III d
NIP. 1972 1215 200902 1001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD. ERWINSYAH. SE**
Jabatan : **JF. PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI. ST. MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Terlaksananya peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Terlaksananya Program Pekerja Sosial.
3. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
4. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian LHKPN Per 31 Maret Setiap Tahun.
5. Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai.
6. Melaksanakan penyajian data SPIP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
7. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah.
8. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan / Bimbingan Tekhnis SDM Pendamping Sosial.
9. Terlaksananya Pelayanan Publik Pada Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

10. Terlaksananya Laporan Program Pengentasan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
11. Terlaksananya Upaya Penurunan Prevalensi Stunting.
12. Merumuskan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
13. Tersusunnya Kebijakan Administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
14. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan Baik Secara Tertulis Maupun Lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS


AHMAD FAHRUL ST. MM
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,
JF. PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


MOHD. ERWINSYAH. SE
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19821215 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS Yang Terlayani	Orang	820
2	Terlaksananya Program Pekerja Sosial	Jumlah Laporan	Laporan	10
3	Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan	Laporan	4
4	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian LHKPN Per tanggal 31 Maret setiap tahun	Jumlah Laporan	Laporan	1
5	Terlaksananya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai	Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Dokumen	1
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian Perjanjian Kinerja	Dokumen	1
7	Terlaksananya Penyajian Data SPIP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Data	Data	4
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelekasanaan "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan	10

9	Terlaksananya kegiatan Peningkatan/Bimtek SDM Pendamping Sosial	Jumlah Pelaksanaan	Kegiatan	2
10	Terlaksananya Pelayanan Publik Pada Masyarakat di Bidang Linjamsos	Jumlah yang terlayani	Laporan	10
11	Terlaksananya Laporan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
12	Terlaksananya Upaya Penurunan Prevalensi Stunting	Jumlah Kegiatan	Dokumen	1
13	Tersusunnya kebijakan administrasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
14	Melaksanakan tugas Kedinasan Lainnya Yang diberikan Oleh Atasan Baik Secara Tertulis Maupun Lisan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	6

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG LINJAMSOS


AHMAD FAHRUL ST. MM
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,
JF. PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA


MOHD. ERWINSYAH. SE
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19821215 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA IRJAYATI, A,Md

Jabatan : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD FAHRUJI, ST., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah;
2. Mengumpulkan bahan- bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
4. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) berupa SPT Tahunan;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan Pengumpulan dan Penghimpunan Data sesuai tugas dan fungsi jabatan sebagai bahan pendukung penyajian informasi untuk perumusan alternatif kebijakan OPD;
7. Melaksanakan Indikator Kinerja Individu sesuai tugas dan fungsi jabatan;
8. Melaksanakan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sesuai dengan jabatan dan fungsi;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

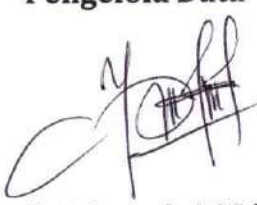
Pihak Pertama

**Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,**


Ahmad Fahrul, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197812082009021001

Pihak Kedua,

Pengelola Data


Ida Irjayati, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 198202082006042030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Bantuan Sosial Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Terlaksananya Administrasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (WRSE)	Jumlah Laporan	Laporan	1
3	Terlaksananya Tingkat kepatuhan atas Laporan SPT Tahunan, SKP, Perjanjian Kinerja dan IKI	Jumlah Laporan	Laporan	1
4	Terlaksananya Rapat dokumen Survey Penerima Bantuan UEP	Prosentasen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75
5	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	12
6	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perwalian Anak dan Adopsi Anak	Jumlah Pelaksanaan	Kegiatan	1
7	Terlaksananya Kegiatan Rakoor Pendamping PKH	Jumlah Pelaksanaan	Kegiatan	1
8	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat dalam Pembuatan Rekomendasi untuk Masyarakat	Prosentase Indeks Pelayanan Publik	Persen	79
9	Terkoordinasinya Pelaksanaan Pengawasan, monitoring dan Evaluasi di Bidang Linjamsos	Jumlah Rapat Evaluasi	Kali	2
10	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat Bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Berkas	30

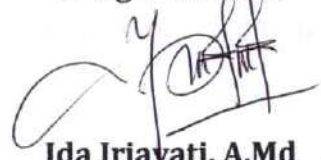
11	Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi(TUSI) bidang	Jumlah Koordinasi/ SPT	Kali	8
----	---	------------------------	------	---

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2024

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin,


Ahmad Fakhruji, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197812082008021001

Pihak Kedua,
Pengelola Data


Ida Iriyati, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 198202082006042030



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENNY WAHYUNI, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS MASALAH SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

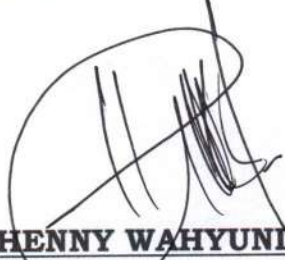
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUDI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
ANALIS MASALAH SOSIAL


HENNY WAHYUNI, S.Sos
PENATA MUDA TK. I/III/b
NIP. 198106022000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data PMKS	Persentase Pengelolaan Data DTKS Cakupan Kabupaten/Kota	Persen	80
2	Terlaksananya Sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan data Fakir miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Yang Terdaftar Dalam DTKS	Persen	80
3	Terlaksananya pengadministrasi penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan PBI PB PEMDA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,30
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
7	- Terlaksananya keikutsertaan dalam Peningkatan SDM/ Bimtek, Pelaporan evaluasi capaian kinerja - Terlaksana Laporan E pantau Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	12

8	Terlaksananya Pelayanan Publik pada masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP PEMDA	Jumlah yang terlayani	Dokumen	12
9	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
10	- Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos - Pembuatan SK WRSE Tahun 2025	Jumlah Dokumen	Dokumen	5
11	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Laporan	1
12	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SPT TAHUNAN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
ANALIS MASALAH SOSIAL


HENNY WAHYUNI, S.Sos
PENATA MUDA /III/b
NIP. 198106022000122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MATHEUS, S.Sos**

Jabatan : **PENGELOLA DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



MATHEUS, S.Sos
PENATA MUDA /III/a
NIP. 197606052006041024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data PMKS	Persentase Pengelolaan Data DTKS Cakupan Kabupaten/Kota	Persen	80
2	Terlaksananya Sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan data Fakir miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Yang Terdaftar Dalam DTKS	Persen	80
3	Terpenuhinya data terkait Forum Konsultasi Publik Bidang Linjamsos	Jumlah Pelaporan data dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Bidang Linjamsos	Laporan	1
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan PBI PB PEMDA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,30
5	Terinputnya data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
7	- Terlaksananya keikutsertaan dalam Peningkatan SDM/ Bimtek, Pelaporan evaluasi capaian kinerja - Terlaksana Laporan E pantau Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	12

8	Terlaksananya Pelayanan Publik pada masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP PEMDA	Jumlah yang terlayani	Dokumen	12
9	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
10	- Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos - Pembuatan SK Kukar Idaman Tahun 2025	Jumlah Dokumen	Dokumen	5
11	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Laporan	1
12	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SPT TAHUNAN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA


MATHEUS, S.Sos
PENATA MUDA /III/a
NIP. 197606052006041024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERLINA, S.Sos**

Jabatan : **PENGELOLA DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA



HERLINA, S.Sos
PENATA MUDA /III/a
NIP. 197210082006042017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data PMKS	Persentase pengelolaan data BPJS/PBI	Persen	80
2	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan PBI PB PEMDA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,30
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
4	Terlaksananya keikutsertaan dalam Peningkatan SDM/ Bimtek, Pelaporan evaluasi capaian kinerja	Jumlah Keikutsertaan	Kegiatan	1
5	Terlaksananya Pelayanan Publik pada masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP PEMDA	Jumlah yang terlayani	Dokumen	12
6	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
7	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
8	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Laporan	1

9	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SPT TAHUNAN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100
---	--	--	--------	-----

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA

HERLINA, S.Sos
PENATA MUDA /III/a
NIP. 197210082006042017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASTIYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya .

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  AHMAD FAHRUDI, ST.,MM PENATA TK. I /III/d NIP. 197812082009021001	Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM  MASTIYAH PENGATUR MUDA /II/a NIP. 198411102012122002
--	---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan data Fakir miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Persen	80
2	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada pelayanan PBI PB PEMDA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,30
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
4	- Terlaksananya keikutsertaan dalam Peningkatan SDM/ Bimtek, Pelaporan evaluasi capaian kinerja - Terlaksana Laporan E pantau Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	12
5	Terlaksananya Pelayanan Publik pada masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP PEMDA	Jumlah yang terlayani	Dokumen	12
6	Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2

7	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja di bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
8	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Kegiatan	Laporan	1
9	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUJI, ST.,MM
PENATA TK. I /III/d
NIP. 197812082009021001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



MASTIYAH
PENGATUR MUDA /II/a
NIP. 198411102012122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI**

Jabatan : **ANALIS MASALAH SOSIAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menganalisis masalah sosial dan menyusun rekomendasi untuk pemecahannya
2. Melaksanakan kegiatan intervensi prevalensi stunting meliputi kegiatan Pendampingan P2K2 Modul Kesehatan dan Gizi, Pemberian Bantuan Pangan Kepada Keluarga Beresiko Stunting dan pengisian data pada E Bangda Stunting
3. Melaksanakan pengumpulan data survey kepuasan penerima bantuan keluarga beresiko stunting
4. Melaksanakan administrasi penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)
6. Melaksanakan pengisian Laporan E pantau Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga
7. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP Pemda
8. Terlaksana administrasi pengisian Aplikasi RBPK

9. Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos
10. Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan

Pihak kedua:

1. Melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaulasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAFURUJI, ST, MM
Penata TK.I/ III/d
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,
**Analisis
Masalah Sosial**


NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.PdI
Penata Muda Tk.I/ IIb
NIP. 19791005 200801 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS MASALAH SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksana Bantuan Makanan kepada Keluarga Terdampak Stunting	Jumlah Laporan	Dokumen	1 Laporan
2	Terlaksana administrasi Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	Dokumen	1 Laporan
3	Terlaksana dokumen Survey Penerima Bantuan Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Laporan	Dokumen	1 Laporan
4	Terlaksananya administrasi penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan	Persentase	100 persen
5	Terlaksananya partisipasi "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah Kegiatan	Laporan	12 Laporan
6	Terlaksana Laporan E pantau Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	Dokumen	12 laporan
7	Terlaksana Pelayanan Masyarakat dalam pembuatan Rekomendasi PBI BP Pemda	Jumlah Laporan	Dokumen	35 Dokumen
8	Terlaksana Laporan SPT Tahunan, SKP dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
9	Terlaksana administrasi pengisian pada Aplikasi RBPK	Jumlah Laporan	Dokumen	3 laporan
10	Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	50 Dokumen

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
11	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan	Dokumen	20 Dokumen
12	Terlaksana Perumusan Dokumen RKA bidang Linjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 dokumen

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL**


AHMAD FAHRUL, ST, MM
Penata TK I/ III d
NIP. 19781208 200902 1 001

Pihak Pertama,
**ANALIS PENANGANAN
MASALAH SOSIAL**


NUR WAHIDATUZZAKIAH, S.Pdi
Penata Muda Tk.I/ III b
NIP. 19791005 200801 2 032



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GHAUSUL ARIFIN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



GHAUSUL ARIFIN
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197601042001121001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAIRIF**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



HAIRIF
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197711052010011014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksana Realisasi Pelaporan Penyaluran PKH Zona Hulu	Jumlah Laporan	Laporan	1
2.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
3.	Terlaksananya Pelaporan Pendamping PKH	Jumlah Laporan	Laporan	40
4.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	Dokumen	5
5.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sampai Ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Penyampaian Perjanjian Kerja PK (Maksimal 1 bulan Setelah APBD Di Tetapkan)	Persen	100
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


AHMAD FAHRUJI,ST,MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


HAIRIF
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197711052010011014



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IFVAN FADILLAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197908262008011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksana Bantuan Kukar Idaman	Jumlah Laporan	Laporan	1
2.	Terlaksana dokumen Kepuasan Survey Bantuan Kukar Idaman	jumlah laporan	Dokumen	12
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
4.	Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
5.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	Dokumen	5
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


IFVAN FADILLAH
Pengatur Tingkat I II/d
NIP. 197908262008011012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISNO SUSILO**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AHMAD FAHRUJI,ST,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) dan;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**



AHMAD FAHRUDI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

**Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM**



ISNO SUSILO
Pengatur Tingkat I III/b
NIP. 197403052001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksana Bantuan Kukar Idaman	Jumlah Laporan	Laporan	1
2.	Terlaksananya kegiatan Santunan kepada Veteran dan Jnada Veteran	Jumlah Penerima	Orang	79
3.	Terlaksana dokumen Kepuasan Survey Bantuan Kukar Idaman	Jumlah Laporan	Laporan	12
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	12
5.	Terlaksananya administrasi surat menyurat Bidang Limjamsos	Jumlah Dokumen	Dokumen	4
6.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	5
7.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025	Persen	100
8.	Terlaksananya Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


AHMAD FAHRUJI, ST, MM
Penata Tingkat I III/d
NIP. 19781208200921001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


ISNO SUSILO
Pengatur Tingkat I III/b
NIP. 197403052001121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS SOSIAL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

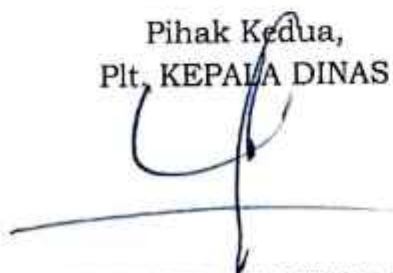
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS



Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bidang	Persen	85
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90 (Baik)
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Maturitas SPIP pada Bidang PKBPTMP	Semester	2
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	24
10.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Keterisian Data LPPD	Persen	100
11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Realisasi Kinerja Program/Keg/Sub Keg bidang	Persen	95
12.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Pengisian Data IKK	Persen	100
15.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

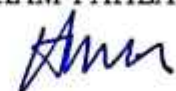
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 1.250.000.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.225.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 1.900.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 4.375.000.000	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196807081994031013

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN
BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN


RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

5. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Pimpinan Pengampu Indikator Kinerja;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198108132006041013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	18
3.	Terlaksananya Rapat Evaluasi standar pelayanan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Maturitas SPIP pada Bidang PKBPTMP	Laporan	4
5.	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesian Data Penanganan Korban Bencana	Jumlah Data Penanganan Korban Bencana	Laporan	1
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
7.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	30
8.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
9.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



AKHMAD RIFANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198108132006041013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USMANSYAH EFFENDI, SST, MM

Jabatan : ANALIS MASALAH SOSIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TMP

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
8. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
10. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
11. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
13. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Bidang	Dokumen	17
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	30
4.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
5.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
6.	Mengikuti dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang sosial	Jumlah Kegiatan	Kali	4
7.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	Kegiatan	15

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TMP



RIADI HADIWINOTO, S.Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
ANALIS MASALAH SOSIAL



USMANSYAH EFFENDI, SST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196901011994011002

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
ANALIS MASALAH SOSIAL

USMANSYAH EFFENDI, SST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196901011994011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL MOCHLIS, SE

Jabatan : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

5. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
6. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
7. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
9. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)

NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA



AL MOCHLIS, SE

Penata TK I (III/d)

NIP . 197104011994011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	17
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	30
4.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
5.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	-

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA



AL MOCHLIS, SE
Penata TK I (III/d)
NIP . 197104011994011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari, SE
Jabatan : Analis Masalah Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Riadi Hadiwinoto, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana Alam dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawn

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji :

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah sesuai dengan jabatan dan fungsi.
2. Membuat indikator kinerja secara individu untuk mengukur hasil kerja individu dan dapat juga digunakan untuk menilai kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan jabatan dan fungsi pihak pertama.
4. Membuat pelaporan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP)/ Manajemen Resiko unit kerja Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang dimana prosesnya saling berkaitan dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

6. Mengumpulkan bahan-bahan kerja, data, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dan mengikuti prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan dan bahan pendukung laporan.
7. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas.
8. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar bisa dipergunakan dan bermanfaat;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
10. Menyelesaikan Laporan SPT Tahunan;
11. Menjadi ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
12. Melaksanakan Core Value ASN "BerAKHLAK";
13. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN
14. Melaksanakan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sesuai dengan jabatan dan fungsi;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

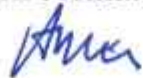
Pihak Kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau mengundurkan diri dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penanganan Korban
Bencana Alam dan Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan,



Riadi Hadiwinoto, S.Hut

Pembina

NIP. 196812212003121002

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,

Analisis Masalah Sosial



Novitasari, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 198612152010012019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	17
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Maturitas SPIP pada Bidang PKBPTMP	Laporan	4
4.	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesediaan Data Penanganan Korban Bencana	Jumlah Data Korban Bencana dan jenis kejadian bencana	Laporan	5
5.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan SPT Tahunan dan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap Tahun	Persen	100
6.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
7.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	30
8.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
9.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100

TUGAS SEBAGAI ANALIS MASALAH SOSIAL

NO	SASARAN URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Jumlah Laporan Kejadian dan Korban Bencana	Laporan/Bulan	5
2	Terlaksananya pelaporan bulanan fisik dan keuangan kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan akun PPTK sebagai operator input pelaporan e-Pantau	Jumlah pelaporan bulanan fisik dan keuangan dengan menggunakan akun PPTK	Bulan	12 Bulan
3	Tersedianya Laporan Maturitas SPIP/Manajemen Resiko Bidang	Jumlah Laporan Maturitas SPIP pada Bidang PKBPTMP	Laporan	4
4	Terlaksananya penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan	Jumlah data untuk mendukung laporan SPM	Data	1
5	Terlaksananya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Jumlah data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	17
6	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Kali	30
7	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah Kegiatan yang diikuti terkait perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi Bidang	Kegiatan	15

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana
Alam dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan,



Riadi Hadiwinoto, S.Hut

Pembina

NIP. 196812212003121002

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
Analisis Masalah Sosial



Novitasari, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 198612152010012019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN SETIAWAN

Jabatan : PENGADMINISTARI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	17
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kali	30
4.	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data Penanganan Korban Bencana	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
5.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
6.	Mengikuti dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan program kerja di bidang sosial;	Jumlah Kegiatan	Kali	4
7.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	Kali	100

5. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Pimpinan Pengampu Indikator Kinerja;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTARI UMUM

IWAN SETIAWAN

Penata Tk.I (III/b)
NIP. 197409192001121004

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTARI UMUM



IWAN SETIAWAN
Penata Tk.I (III/b)
NIP. 197409192001121004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI

Jabatan : PENGADMINISTARI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RIADI HADIWINOTO, S.Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melaksanakan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanganan Korban Bencana guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

5. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
7. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
8. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Pimpinan Pengampu Indikator Kinerja;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

RIADI HADIWINOTO, S. Hut

Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTARI UMUM

WAHYUDI

Pengatur Muda Tk.I (II/d)
NIP. 198104282007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat penanganan.	Persen	100
2.	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Tersedianya data dan laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Dokumen	17
3.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kali	30
4.	Mengumpulkan Bahan - Bahan Kesedian Data Penanganan Korban Bencana	Persentase Keterisian Data IKK Perangkat Daerah	Persen	100
5.	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Capaian Indeks Penerapan SPM	Persen	100
6.	Mengikuti dan mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan program kerja di bidang sosial;	Jumlah Kegiatan	Kali	4
7.	Terlaksannya tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	Kegiatan	Kali	100

KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025
BIDANG PENANGANAN KORBAN BENCANA DAN PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN		-	

Kutai Kartanegara, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENANGANAN
KORBAN BENCANA DAN
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN



RIADI HADIWINOTO, S. Hut
Pembina (IV/a)
NIP. 196812212003121002

Pihak Pertama,
PENGADMINISTARI UMUM



WAHYUDI
Pengatur Muda Tk.I (II/d)
NIP. 198104282007011006